ARTIKEL

Memposisikan Perpustakaan Daerah dalam Pengembangan *E-Government* Indonesia

Wawan Wiraatmaja
Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB)
Wawan@kalteng.net
Kudang Boro Seminar
Departemen Teknik Pertanian, FATETA, Institut Pertanian Bogor (IPB)
kseminar@bima.ipb.ac.id

Abstract

This paper tries to show the position of the public library as one of the local devices in developing e-government in Indonesia. It is described about the e-government and how important is the integral understanding to a variety of the government elements in supporting the development. The description is based on the understanding of the Indonesian government model with its current local autonomy which give the local government a huge power to execute the government functions. The library is directed as the information dissemination elements and the coomunication device between the local goverment and the society.

1. Pendahuluan

E-government merupakan sebuah model pengembangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan secara intensif dan ekstensif berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mencapai bentuk pemerintahan yang ideal. Dengannya diharapkan tercipta pemerintahan yang responsif terhadap keinginan masyarakat, transparan, dan akuntabilitasnya terjaga. Sementara itu, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan pemerintahan serta lebih meningkat partisipasinya dalam pembangunan.

Konstelasi politik negara dan pemerintahan daerah di Indonesia sendiri telah berubah drastis sejak era reformasi. Saat ini telah terjadi pemberian otonomi daerah yang lebih luas dengan desentralisasi tugas dan tanggung jawab besar pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mendapat kesempatan lebih besar untuk menentukan sendiri fokus pembangunan daerah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya dan kemampuan perangkat daerah.

Salah satu perangkat daerah yang terkait dengan penyebaran informasi adalah perpustakaan daerah sebagai badan yang selama ini hanya dianggap hanya sebagai sumber bacaan umum, terutama yang bersifat hiburan. Dalam konsep pengembangan dan pembangunan daerah, perpustakaan dapat lebih diintensifkan fungsinya sebagai salah satu sumber informasi pembangunan daerah dan dengan memanfaatkan berbagai sistem dan TIK memungkinkan transfer informasi yang lebih cepat, murah, dan efektif. Fungsi penyebarluasan informasi pun kemudian dapat diintensifkan dengan pemberian layanan dalam model informasi yang beragam sehingga dapat memberikan nilai tambah.

Pemahaman yang integral atas keberadaan perpustakaan daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang dapat mendukung otonomi daerah dan perkembangan *e-government*, akan meningkatkan nilai tambah perpustakaan sebagai salah satu aktor pemerintahan. Selanjutnya, perpustakaan daerah tidak akan hanya dipandang sebagai institusi sekadar ada tetapi menjadi satu keharusan untuk pembangunan daerah yang berlandaskan otonomi daerah dan bervisi maju dengan *e-government.*

2. Informasi dan *E-Government* sebagai Revitalisasi Pemerintahan di Indonesia

Perkembangan TIK yang sangat pesat, terutama dengan keberadaan Internet, mengakibatkan suatu pemerintahan harus dapat beradaptasi dan memanfaatkannya dengan baik. Pemerintah yang menerapkan berbagai aspek TIK dalam melaksanakan fungsi-fungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (*electronic-government, e-government*). Banyak negara mulai mencoba mengadaptasi perkembangan Internet dengan mengimplementasikan sistem yang diyakininya merupakan bentuk dari *e-government. E-government* diyakini merupakan perbatasan berikutnya (*next frontier*) yang harus dijelajahi dalam menggunakan Internet dan memiliki potensi terbesar untuk merevolusi penyelenggaraan pemerintahan dan merevitalisasi demokrasi [1].

Berbagai definisi *e-government* dikeluarkan oleh lembaga dan institusi pemerintahan. Salah satu pernyataan yang cukup baik untuk mendefinisikan *e-government* dikeluarkan oleh World Bank [2}:

> *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the (1) ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: (2) better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, (3) citizen empowerment through access to information, or more (4) efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.*

Beberapa definisi lain, dengan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda dinyatakan di dalam Tambouris *et al.* [3} mulai dari *"e-business of the state"*, pelayanan kepada penduduk dan rekayasa ulang (*re-engineering*) memanfaatkan teknologi, atau usaha pemenuhan kebutuhan dengan memanfaatkan Internet. Sementara terkait dengan administrasi publik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *e-government* sebagai: *memanfaatkan internet dan world-wide-web untuk mengirimkan* ***informasi*** *dan* ***layanan*** *pemerintahan kepada masyarakat* [4].

Di sini terlihat bahwa interpretasi tentang *e-government* menjadi luas dan menyebar [5]. Di satu sisi *e-government* dapat dilihat sebagai suatu visi dan disiplin pengarah untuk seluruh sektor administrasi dan pemerintahan. Sementara itu, wilayah keberadaan *e-government* dapat dilihat dalam skala besar dan dalam skala kecil. *E-government* dalam skala besar adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan adminstrasi termasuk *e-democracy, e-voting, e-administration, e-assistance, e-justice,* bahkan *e-healthcare* atau *e-education.* Sementara dalam skala kecil, *e-government* adalah implementasi proses administrasi lokal dalam domain *e-administration.*

Beberapa harapan yang muncul dari revolusi digital adalah **potensinya untuk menguatkan demokrasi** dan membuat pemerintah **lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk**. *E-government* adalah penggunaan TIK untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lebih mudah diakses, efektif dan akuntabilitasnya terjaga [6].

E-government memungkinkan dilakukannya transaksi yang berhubungan dengan sistem pemerintahan setiap saat darimana pun seseorang berada. Sementara penduduk mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas yang proaktif, orang-orang di dalam pemerintahan bekerja dengan antusias menggunakan TIK, menghasilkan sesuatu yang berbeda, menjawab pertanyaan dengan cepat, menggunakan jaringan untuk melayani publik. Sementara itu institusi swasta menikmati interaksi yang cepat dan mudah sehingga meningkatkan perhatian publik.

Pengembangan *e-government* dimaksudkan sebagai salah satu metode untuk memaksimalkan efisiensi bisnis pemerintahan dan mengefektifkan bagian yang berhubungan dengan penyaluran layanan (*services*) kepada publik, penyebaran informasi (*information dissemination*), dan mengurangi biaya cetak (*publishing*) dengan membuat versi elektronik dari dokumen-dokumen yang tersedia sehingga memungkinkan penghematan biaya. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah dengan membangun portal atau situs pemerintahan di Internet.

Memang, perkembangan *e-government* di Indonesia sendiri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak kendala yang muncul mulai dari ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, kondisi sosial politik, sampai dengan keberadaan aplikasi sistem informasi yang spesifik yang dapat digunakan. Selain itu harus diakui bahwa keberadaan berbagai peraturan, petunjuk dan informasi mengenai *e-government* masih belum tersedia dengan memadai.

3. Birokrasi, Informasi, dan Peran Serta Masyarakat Menuju *E-Government*

Dalam ilmu administrasi (negara) seperti dalam Sugandha [7], Suradinata [8], dan Handayaningrat [9] dijelaskan tentang suatu sistem yang kompleks yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan yang disebut birokrasi. Birokrasi tumbuh karena kebutuhan proses kegiatan organisasi dan lingkungan, serta merupakan alat paling efisien untuk organisasi besar dan kompleks. Tetapi disadari bahwa keberadaan birokrasi yang semakin besar, urusan yang berbelit-belit, dan ketidakjelasan tugas dan wewenang menyebabkan birokrasi dapat menjadi "mesin" yang ditakuti masyarakat. Di sini masyarakat dapat menjadi apatis dan tingkat partisipasinya dalam pembangunan menurun.

Dalam suatu negara dengan kekuatan politik dan organisasi massa yang kurang mampu menjalankan fungsi-fungsinya, maka apabila tidak ditunjang oleh proses pengambilan keputusan dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang baik, kekuasaan birokrasi itu akan semakin besar. Semakin besar kekuasaan birokrasi, aparat birokrasi mungkin dapat leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi sesuai dengan persepsi yang dimiliki dan mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintahan. Secara teoritis, keadaan ini mencerminkan kegagalan untuk mewujudkan ide demokrasi dan menutup keterbukaannya kepada masyarakat.

Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi pemerintahan memiliki berbagai sub-sistem yang saling berkaitan, saling mendukung dan menentukan, sehingga dapat membentuk suatu totalitas komponen yang terpadu dalam suatu sistem tersebut. Suradinata [8] menyatakan bahwa pemahaman tentang birokrasi sebagai organisasi, mempunyai implikasi yang lebih luas daripada cakupan birokrasi secara normal. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem dimana masukannya berupa sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber lainnya. Informasi dapat dijadikan dasar untuk rencana kegiatan atau tujuan. Dalam proses organisasi itu melibatkan aspek manusia, sarana dan prasarana, koordinasi, pengawasan, kekuasaan dan kebijaksanaan. Aspek-aspek tersebut merupakan sub sistem, yang dapat dibagi lagi menjadi sub-sub sistem yang keseluruhannya merupakan sistem organisasi.

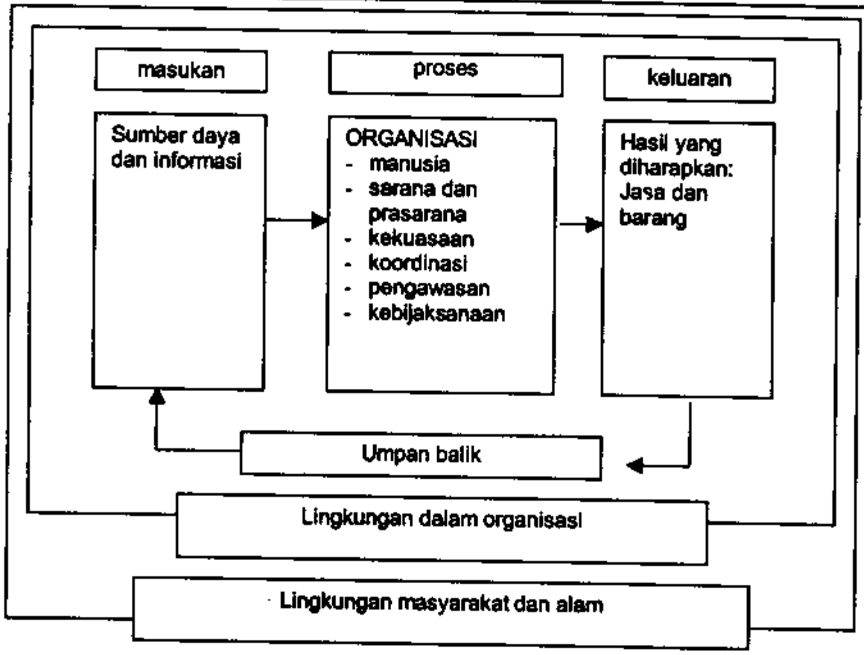

Gambar 1 Pemodelan proses sebagai sebuah sistem untuk sebuah organisasi [8].

Proses organisasi yang merupakan sistem deterministik memiliki sub sistem dan interrelasi yang menunjukkan perilaku yang dapat diramalkan sehingga selanjutnya ditransformasi pada keluaran sebagai hasil yang diharapkan berupa benda atau jasa. Dalam sistem ini, keluaran dikembalikan sebagai masukan untuk umpan balik untuk mendapatkan proses yang lebih baik. Gambaran pemodelan sistem untuk sebuah organisasi diperlihatkan pada Gambar 1.

Dalam proses organisasi terdapat pengaruh lingkungan yang selalu harus diperhitungkan. Pengaruh ini acapkali berhubungan dengan pekerjaan dalam proses organisasi. Jadi, selain pengaruh dalam organisasi terdapat pengaruh lain yaitu lingkungan masyarakat dan alam. Di dalam sistem administrasi/birokrasi negara diperjelas bahwa masukan untuk proses politik adalah: 1) (informasi) kebutuhan masyarakat dan negara, 2) sumber daya manusia dan alam, dan 3) peran serta masyarakat. Sementara hasil dari proses atau keluaran adalah pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan.

Di sinilah kata kunci **informasi** dan **peran serta masyarakat** berpengaruh dalam mengembangkan administrasi/ birokrasi negara yang efektif dan efisien dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik (lihat Osborne [10]). Siagian [11] menyatakan pentingnya peranan informasi dalam kehidupan modern dewasa ini sehingga masyarakat yang mengolah informasi secara "tradisional" - dalam arti tidak menggunakan sarana bermuatan teknologi tinggi - disebut masyarakat prainformasional untuk kata lain masyarakat yang belum maju. Sebaliknya masyarakat yang mengolah berbagai komponen penanganan informasi dengan memanfaatkan kemajuan dan teknologi informasi disebut sebagai masyarakat informasional. Hal yang sama dapat dinyatakan untuk pemerintahan informasional.

Beberapa ciri masyarakat informasional yang cukup penting adalah jumlah informasi yang melimpah, transmisi informasi yang cepat, lingkup informasi yang luas, biaya pengadaan murah, mobilitas informasi, jangkauan informasi terbuka, cara penyampaian informasi lewat banyak media, unit penanganan informasi terutama menggunakan mesin, dan akses informasi yang luas.

Pertanyaan lebih jauh muncul, apakah masyarakat (dan juga pemerintahan) yang informasional berarti telah menerapkan *e-government*?

Bila konsep *e-government* seperti yang dinyatakan di awal tulisan diikuti sebagai acuan, maka harus dilihat dulu bagaimana proses pengolahan informasi tersebut berpengaruh dalam kinerja pemerintahan serta mengubah proses layanan kepada masyarakat. Bila proses informasional tadi hanya bersifat otomatisasi proses-proses di dalam pemerintahan tetapi tidak memberikan transparansi pada proses administrasi negara dan tidak membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan, maka *e-government* tidak terlaksana.

Sebaliknya bila kita lihat bahwa *e-government* merupakan suatu proses antara, maka proses ini harus didahului oleh sebuah proses pemerintahan informasional. Di sini, karena syarat penggunaan TIK adalah syarat utama terciptanya suatu *e-government*, maka proses informasional mutlak harus terjadi lebih dulu.

4. Otonomi Daerah, Pengembangan Sumberdaya Daerah, dan Kontrol Masyarakat

Perkembangan pemerintahan (daerah) yang lebih otonom, dimulai sejak era reformasi pada tahun 1998 (saat yang hampir sama dengan merebaknya penggunaan Internet di Indonesia) dengan dikeluarkannya UU no. 22/1999 (yang kemudian diperbaharui dengan UU no. 32/2004) menyebabkan terjadinya perubahan dalam kewenangan pemerintahan yang ditangani oleh Pemerintah Pusat dan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Secara esensi terjadi perpindahan kewenangan yang sangat besar sehingga memberikan kekuasaan lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah.

Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah terlihat mencoba membangkitkan kembali secara jelas semangat otonomi daerah ini dengan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyarakat, pemerataan dan keadilan. Terjadi banyak perubahan mendasar mulai dari perubahan simbolisasi dengan menghilangkan tingkatan daerah otonom (Dati I dan Dati II) dan menggantinya dengan istilah yang lebih netral, yaitu provinsi, kabupaten dan kota untuk menghilangkan kesan tingkatan yang lebih tinggi lebih berkuasa daripada tingkatan yang lebih rendah. Di sini juga terjadi pembatasan asas dekonsentrasi dengan menghapuskan posisi wilayah administratif di daerah kabupaten/kota dan memperpendek hanya sampai pemerintahan provinsi. Bupati dan walikota kemudian hanya menjadi kepala daerah otonom saja.

Hal ini kemudian berpengaruh pada proses politik dan ekonomi pembangunan daerah. Juga dalam hal implementasi konsep dan rencana-rencana yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Konsep atau rencana-rencana yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga kenegaraan di tingkat pusat (apalagi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan), dapat dengan mudah diabaikan oleh pemerintah di daerah bila dianggap tidak sejalan dengan visi pembangunan di daerah atau bila dianggap tidak memberikan keuntungan segera. Contoh paling jelas adalah keberadaan berbagai retribusi daerah yang kurang dapat dipertanggungjawabkan karena pola pikir keberhasilan pembangunan yang dinilai dari banyaknya dana yang dihasilkan sehingga sering melupakan pemahaman proses investasi yang bersifat jangka panjang termasuk dalam investasi sumberdaya manusia daerah.

Sistem dan organisasi otonomi daerah memang menempatkan bupati/walikota sebagai pimpinan tertinggi daerah. Bupati/walikota dibantu oleh para staf, seperti kepala dinas dan badan, serta camat sebagai bawahan langsung yang mengelola kecamatan. Sistem itu terlihat sebagai organisasi bertingkat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan pembangunan dan pengoperasian potensi daerah.

Ada dua hal utama yang akan menjadi fokus dan sistem manajemen daerah yaitu (a) organisasi dan (b) komunikasi. Dalam organisasi memang masih ada birokrasi yang harus diadopsi dan ada jajaran pegawai yang masih dibutuhkan. Semuanya harus menjamin kelancaran komunikasi seluruh eksekutif dan perangkat organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah (komunikasi internal). Sementara komunikasi eksternal diperlukan sebagai unsur pengawasan dan kontrol dari masyarakat daerah dan dari perangkat perwakilan di DPRD, dimana semuanya harus diikutsertakan sehingga pembangunan daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan otonomi daerah.

Dalam hal organisasi perangkat daerah ini, Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan luas untuk menentukan tingkat kebutuhan organisasi pemerintahan daerah seperti tercantum dalam PP no. 8/2003 dengan batasan-batasan umum. Di sini keberadaaan perangkat daerah yaitu organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibentuk dengan kriteria seperti (1) kewenangan pemerintahan, (2) karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, (3) kemampuan keuangan daerah, (4) ketersediaan sumberdaya aparatur, dan (5) pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Perpustakaan daerah/umum kemudian menjadi salah satu lembaga daerah yang difungsikan untuk melaksanakan tugas di bidang perpustakaan yang karena sifatnya tidak tercakup dalam sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Bila sekretariat daerah dan dinas dimaksudkan terutama sebagai perangkat yang melaksanakan tugas utama pelayanan umum, sipil dan publik, maka lembaga daerah (termasuk salah satunya perpustakaan daerah) melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bila sekretariat daerah, dinas, badan dan perangkat daerah lain lebih berperan dalam fungsi layanan pemerintahan, maka perpustakaan daerah dapat mengambil peran lebih dalam fungsi (penyebarluasan) informasi pemerintahan sebagai wujud transparansi pemerintahan. Hal ini menjadi sangat strategis dan implementatif dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang berlandaskan *e-government* (ingat salah satu esensinya adalah dalam hal **pengiriman informasi** dan **layanan**). Di sini kemudian fungsi pengawasan dan kontrol dari masyarakat untuk berbagai proses pemerintahan dan pembangunan dapat lebih dioptimalkan dengan keberadaan informasi pemerintahan yang tepat sebagai pembanding.

5. Perpustakaan Daerah sebagai Unit Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah Bervisi *E-Government*

Seperti yang telah disadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dan didukung oleh perkembangan TIK menyebabkan produksi informasi menjadi berkembang sangat pesat pula. Demikian pula halnya dengan informasi yang semestinya dihasilkan oleh proses pembangunan dan pemerintahan di daerah. Data statistik daerah, data kepegawaian daerah, data proyek-proyek pembangunan, informasi bidang lingkungan, bidang penataan ruang, kepariwisataan dan sebagainya. Membiarkan informasi dan berbagai laporan ini berada di berbagai instansi membuat masyarakat akan lebih sulit mendapatkannya apalagi untuk berbagai laporan yang sifatnya lintas sektoral. Mengumpulkannya di dalam suatu unit layanan informasi (perpustakaan) menjamin keberadaan informasi tersebut dalam hal eksistensi, verifikasi dan klasifikasinya

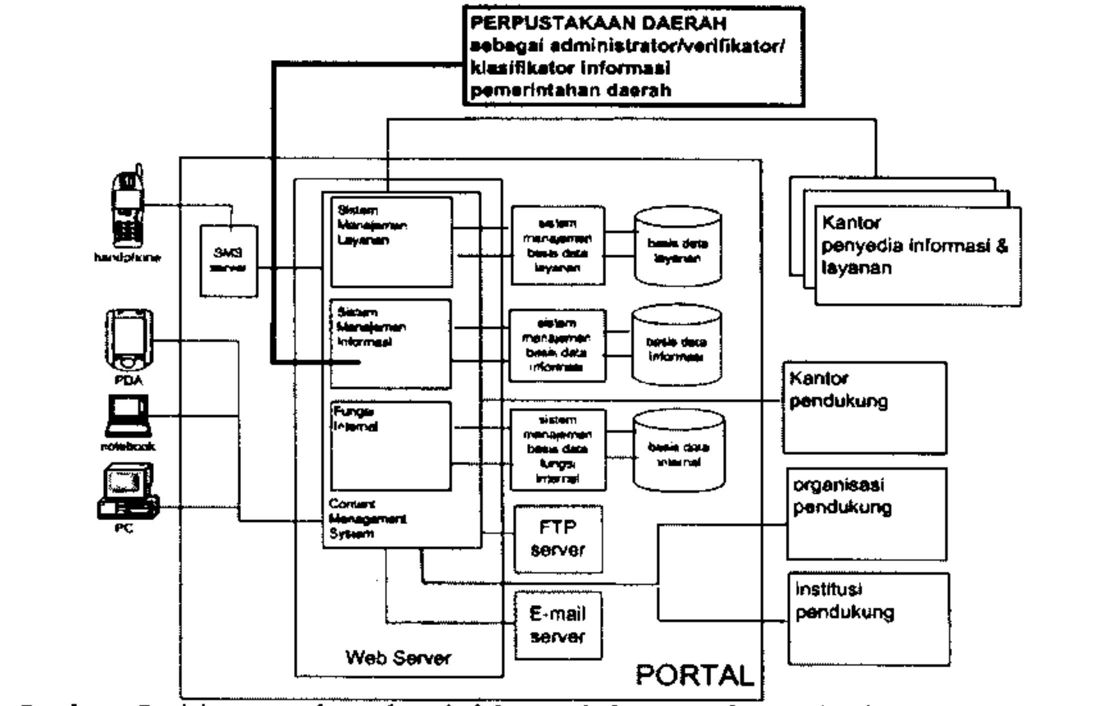

Gambar 2 Posisi perpustakaan daerah dalam arsitektur portal pemerintahan *e-government*.

sehingga memudahkan pencarian bagi yang berkepentingan.

Peran perpustakaan (dengan pustakawan di dalamnya) kemudian adalah membantu pencari informasi pemerintahan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengarahkan agar pencarian informasi dapat efisien, efektif, tepat sasaran, serta tepat waktu. Salah satu model penyebaran layanan dan informasi dalam *e-government* adalah disediakannya sebuah akses tunggal terstruktur berupa **portal pemerintahan** yang diakses dengan berbagai peralatan TIK terutama menggunakan teknologi Internet [3]. Di sini perpustakaan daerah dapat menjadi bagian dari administrator sistem informasi yang berperan mengatur pengelolaan informasi pemerintahan daerah sehingga memberikan informasi yang terkini dan bermanfaat. Gambaran posisi perpustakaan daerah dalam implementasi *e-government* di dalam sebuah arsitektur portal pemerintahan dapat dilihat pada gambar 2.

Dalam konsep masyarakat madani (*civil society*), ada empat pilar pemimpin masyarakat dalam pembangunan; pemerintah, kelompok bisnis dan industri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media. Keempatnya tidak boleh lebih kuat satu dari yang lain. Pemerintah tidak boleh menjalin kerjasama dengan kelompok bisnis dan industri tanpa memperhatikan masukan dari LSM dan media. Heterogenitas masyarakat menyebabkan diperlukan komunikasi yang lancar antara penentu kebijakan pembangunan daerah dan masyarakat lewat media massa.

Di sini peran perpustakaan dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat berfungsi sebagai mitra terutama bagi institusi di luar pemerintahan untuk mendapatkan informasi pemerintahan yang seimbang. Sebagaimana fungsi tradisionalnya, pustakawan dapat mengarahkan pencari informasi pemerintahan untuk mendapatkan informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Pustakawan dapat pula menyediakan informasi yang mungkin sangat bernilai, namun keberadaannya sering tersembunyi, seperti literatur kelabu (*grey literature*).

Perpustakaan daerah kemudian tidak hanya menjadi sumber bacaan umum bagi masyarakat tetapi juga menjadi pusat informasi khusus pemerintahanan daerah.

Di sinilah kemudian pemerintahan yang bervisi *e-government* akan menyadari bahwa perpustakaan merupakan sebuah elemen penting dalam proses transformasi informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

6. Transformasi Visi dan Misi Perpustakaan Daerah dalam Rangka Pengembangan *E-Government* Indonesia

Perkembangan TIK dan keragaman kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks, berimplikasi kepada perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Kondisi demikian menuntut keberadaan SDM penyedia dan pengelola informasi dan dokumentasi yang profesional dan berkompeten serta memahami maksimal pemanfaatan TIK.

Dalam konsep *e-government*, jelas bahwa pemanfaatan TIK merupakan prasyarat utama untuk terciptanya sebuah pemerintahan yang ideal. TIK dimanfaatkan di dalam sistem internal pemerintahan dan sebagai suatu sistem eksternal untuk berhubungan dengan masyarakat. Di dalam perpustakaan sendiri, proses internal pengumpulan dan pencarian informasi sudah selayaknya memanfaatkan berbagai sistem TIK sehingga pada akhirnya mempercepat dan mempermudah proses pencarian kembali. Sementara untuk berhubungan dengan para pencari informasi pemerintahan, perpustakaan juga dapat memberikan berbagai model informasi yang lebih fleksibel seperti dengan menyiapkan sebuah akses data atau dengan memberikan bentuk data digital dalam disk atau cd-rom.

Pemahaman yang baik pada esensi sebuah pemerintahan yang responsif terhadap keinginan masyarakat sebagai syarat *e-government* akan menyadarkan berbagai pihak penyelenggara pemerintahan untuk mengubah pandangan akan keberadaan perpustakaan. Berbagai instansi akan lebih senang memberikan berbagai informasi dan data yang dihasilkannya untuk dikelola perpustakaan sehingga dapat lebih memfokuskan kegiatan internal pemerintahan di dalam instansi untuk berhubungan dengan proses layanan kepada masyarakat. Sementara itu, perpustakaan yang bervisi *e-government*, selain mencoba memberikan cara tercepat dalam pemberian informasi kepada masyarakat, juga akan berusaha mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait yang dapat digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Informasi ini bisa berasal dari internal pemerintahan untuk dimanfaatkan sesama instansi, atau pun yang berasal dari luar institusi pemerintahan (media massa, Internet dan media lain) yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pendukung proses penetapan kebijakan pembangunan. Gambar 3 memperlihatkan gambaran fungsi perpustakaan daerah dalam pengelolaan informasi/data internal dan eksternal pemerintahan.

Dengan kerjasama antara berbagai perpustakaan daerah yang bervisi sama, dimungkinkan tukar menukar informasi dan data yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pembanding. Sebagai contoh, sebuah peraturan daerah yang terbukti berhasil di suatu daerah, bila berbagai data pendukungnya tersedia akan dapat diterapkan juga di daerah lain. Kebijakan pembangunan tertentu yang terbukti berhasil, bisa dengan cepat diimplementasikan di daerah lain bila pertukaran informasi dan data yang diwakili oleh perpustakaan daerah berjalan dengan baik. Demikian juga halnya kontrol terhadap berbagai proses pembangunan dapat dilakukan bila ada pembanding yang valid sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya proyek yang tidak menyentuh masyarakat atau dilakukan dengan cara yang korup. Tentunya kemajuan TIK dapat dengan cepat mendukung hal ini terutama untuk informasi yang dapat ditransformasikan dalam bentuk digital.

Di sini kemudian peran Pemerintah diselesaikan. Hal ini terjadi mengingat berbagai hal dan kewenangan lembaga pemerintahan yang berbeda sementara

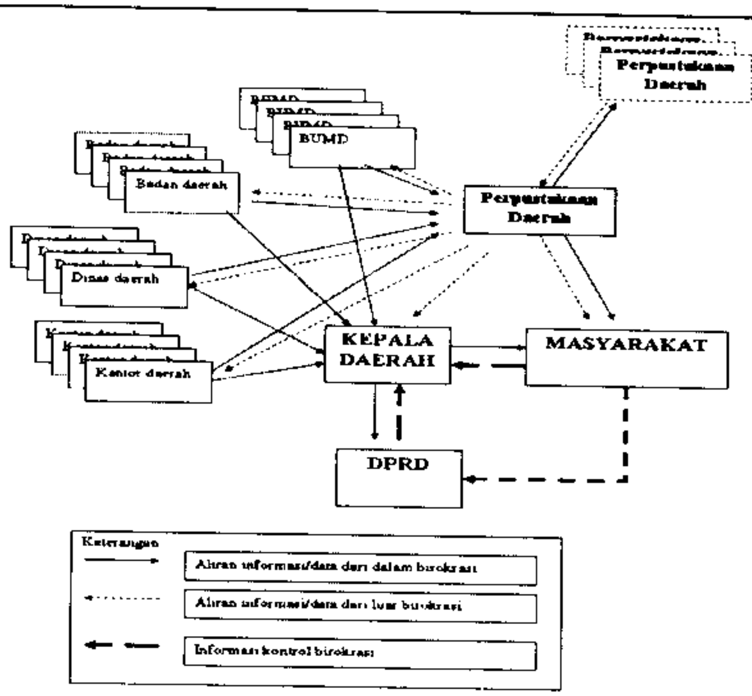

Gambar 3 Aliran informasi/data internal dan eksternal pemerintahan yang dikelola perpustakaan daerah.

Pusat yang diwakili Perpustakaan Nasional diperlukan untuk koordinasi dan penyusunan kebijakan nasional pengembangan fungsi perpustakaan yang mendukung pengembangan *e-government* di Indonesia. Pembentukan standar dan klasifikasi informasi pemerintahan Indonesia (*e-government markup language*) dapat dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Klasifikasi ini dapat berdasar jenis atau tipe sektor, contohnya, kesehatan, pendidikan, industri. Bisa juga diorganisasikan berdasar tipe layanan, sebagai contoh masalah registrasi dan lisensi (surat ijin), atau pemesanan. Selain itu, perbedaan dalam mendeskripsikan suatu hal yang sama antar lembaga pemerintahan dan antara pemerintah dan pengguna harus juga kebutuhan administrasi dan kebutuhan masyarakat sering menyebabkan diperlukannya interaksi dengan lebih dari satu lembaga pemerintahan yang berwenang.

Kemudahan pencarian informasi juga harus menjadi perhatian tersendiri dimana diperlukan suatu sistem klasifikasi yang konsisten dari setiap informasi yang disediakan setiap badan. Hasil dari sistem ini adalah sebuah katalog terintegrasi dari informasi yang kemudian dapat disebarluaskan ke seluruh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan oleh unit pengelola informasi (perpustakaan daerah). Contohnya, bila kita menginginkan informasi tentang "perijinan", maka perpustakaan dapat memberikan pilihan seperti perijinan perdagangan (usaha), perijinan bangunan

(IMB), atau perijinan kendaraan (SIM atau STNK).

Memang bentuk ideal dari *e-government* adalah proses transformasi informasi dan penyalurannya menggunakan sepenuhnya saluran TIK tanpa perlu ada keterbatasan pada ruang dan waktu (akses Internet). Tetapi, bentuk antara seperti yang dapat dilakukan dengan membuat titik-titik akses informasi pemerintahan di perpustakaan daerah, pada akhirnya akan menjadi sangat bermanfaat untuk menciptakan satu kesatuan informasi pemerintahan nasional yang ideal ketika masalah akses dan infrastruktur telah teratasi.

7. Kesimpulan

Perpustakaan daerah merupakan titik akses informasi dan komunikasi pemerintahan selain menjalankan tugas umumnya sebagai sumber bacaan bagi masyarakat. Dengan transformasi visi dan misi perpustakaan daerah sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan bervisi *e-government*, dapat diharapkan semakin cepatnya tercipta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat yang partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Perpustakaan daerah kemudian akan menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan dan implementasi *e-government* di daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Daftar Pustaka

[1] [CEG] The Council for Excellence in Government. 2000. E-Government The Next American Revolution. Intergovernmental Technology Consortium. http://www.excelgov.org. [1 Maret 2003].

[2] World Bank. 2001. A Definition of E-Government. Http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm. [3 Maret 2005].

[3] Tambouris E, Gorilas S, Boukis G. 2001. Investigation of Electronic Government. Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics; Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001. hlm 367-376.

[4] [UN-DPEPA] United Nations Division for Public Economics and Public Administration. 2002. Benchmarking E-Government: A Global Perspective. New York: America Society for Public Administration.

[5] Wimmer M, Krenner J. 2001. An Integrated Online One-Stop Government Platform: The eGOV Project. In Hofer, Chroust. IDIMT-2001. 9th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings, Schriftenreihe Informatik, Universitätsverlag Trauner, Linz, pp. 329-337.

[6] [CDT] Center for Democracy dan Technology. E-Government Handbook. http://www.cdt.org/egov/handbook/. [3 Maret 2005].

[7] Sugandha D. 1989. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Intermedia.

[8] Suradinata E. 1994. Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan. Bandung: Ramadan.

[9] Handayaningrat S. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Toko Gunung Agung.

[10] Osborne D, Gaebler T. 1996. Mewirausahakan Birokrasi. Rosyid A, penerjemah. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan dari: Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.

[11] Siagian SP. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.